

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Usaha Kecil Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Mikro

Secara umum teori ilmu ekonomi dibagi menjadi (2) yaitu: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Perbedaan itu dilihat dari asal kata “mikro” berarti kecil dan “makro” yang berarti besar. Dengan demikian teori mikro ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil. Berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya, teori mikro ekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Usaha kecil merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang bisa berdiri sendiri yang akan dikelola dan dimiliki oleh perorangan maupun dikelola oleh sebuah badan usaha. Dari banyaknya jenis usaha yang ada di sekitar kita, kita pasti tahu bahwa usaha-usaha tersebut memiliki penggolongannya sendiri sesuai dengan modal usaha yang dikeluarkannya. Usaha Kecil Menengah (UKM) tergolong dalam ekonomi mikro karena kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.¹²

¹² Rokhmat Subagiyo, SE,MEI, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:Alim's Publishing,2016),h,3.

Secara keseluruhan teori ekonomi mikro membahas arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus sektor faktor produksi dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Susunan arus tersebut dan terciptanya harga dari arus tersebut. Dengan demikian teori ekonomi mikro mempelajari tiga kegiatan pokok dalam masyarakat yaitu: kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran.¹³

Dari kegiatan pokok dalam masyarakat tersebut, menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi yaitu konsep pasar. Pasar adalah penghubung antara produsen dengan konsumen. Konsep pasar akan melahirkan pembahasan dalam teori ekonomi mikro, yang dibagi kedalam tiga kelompok besar teori, yaitu teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, dan teori pasar.

Dari uraian di atas dapat diketahui, bahwa dalam teori ekonomi mikro terdapat perbedaan sasaran perusahaan. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan (termasuk UKM) dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba yang maksimal. Jadi orientasinya bukan laba (*non-profit*) tetapi cenderung ke *service oriented* (maksimalisasi pelayanan). Namun perbedaan pandangan ini bukan berarti tidak ada relevansi teori ekonomi mikro dalam UKM, dalam hal konsep-konsep yang diajukan dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis keberadaan UKM, dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu.

¹³Ida Nuraini, *Pengantar Ekonomi Mikro*, (Malang: UMM Press, 2016), hal. 8

Berbeda dengan perusahaan individual yang berorientasi pada maksimalisasi laba, UKM mempunyai dua misi utama, yakni pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha itu sendiri. Dari sudut ekonomi, UKM menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu pasar internal dan eksternal. Pasar internal adalah pasar antara perusahaan dengan anggotanya. Pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan dengan non anggota atau anggota potensial.

Dalam pasar internal anggotanya berpartisipasi dalam pembelian barang atau jasa kepada perusahaannya. Sebagai imbal baliknya, perusahaan memperoleh pendapatan dari hasil penjualan tersebut. Jadi ada aliran barang atau jasa dari perusahaan ke anggota dan ada aliran pendapatan dari anggota kepada perusahaan. Sedangkan pasar eksternal (pasar antara perusahaan dengan non anggotanya). Pasar eksternal sama seperti perusahaan individual yaitu memaksimalkan keuntungan dari produk yang dijualnya.

Adanya pasar internal dan eksternal pada sebuah perusahaan membawa konsekuensi tertentu terhadap Dstribusi Surplus (Sisa Hasil Usaha). Jika perusahaan melayani kebutuhan anggotanya, maka setiap transaksi anggota dengan perusahaannya akan memberikan kontribusi tertentu terhadap anggotanya. Kontribusi ini dinilai sebagai jasa anggota.

B. Pengertian Peran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah di harapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Dewi, peran adalah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.¹⁵

Istilah peran (*role*) dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku didalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan

¹⁴ Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 106.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 212.

seperti aktor-aktor professional. Peranan adalah atribut sebagai akibat dari status, dan perilaku yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status, singkatnya, peranan hanyalah sebuah aspek dari status.

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peran dan peranan adalah suatu tindakan atau aktivitas yang diharapkan oleh masyarakat atau pihak lain untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang mereka miliki sehingga peran atau peranan tersebut dapat dirasakan pengaruhnya dalam lingkup kehidupan

C. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah

Pengertian usaha kecil di Indonesia masih sangat beragam. Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perluperhatian yang khusus dan didukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.¹⁶

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan

¹⁶ Ferra Pujiyanti S.Pd, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat dan Terbaik Untuk Menguasai Laporan Keuangan* (Lembar Langit Indonesia, 2015), h, 67.

usaha kecil dan perludilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.¹⁷Menurut Departemen Perindustrian dan Bank Indonesia (1990) mendefinisikan usaha kecil berdasarkan nilai asetnya, yaitu suatu usaha yang asetnya (tidak termasuk tanah dan bangunan) bernilai kurang dari Rp.600 Juta. Sedangkan departemen Perdagangan mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha yang modal kerjanya kurang dari Rp.25 Juta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri kecil adalah usaha industri yang melibatkan tenaga kerja antara 5 sampai dengan 19 orang. Sedangkan industri rumah tangga adalah usaha industri yang memperkerjakan kurang dari 5 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa)

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan

¹⁷ Ibid..hlm.67

definisi di atas. Menurut UU No 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan UsahaKecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah entitas usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria lain ,jenis usaha dilihat dari jumlah karyawan(tenaga kerja) yang dipekerjakan menurut Biro Pusat Statistik (BPS) adalah sebagai berikut suatuusaha yang mempekerjakan tidak lebih dari 4 (empat) orang merupakan usaha rumahtangga atau usaha mikro, jika mempekerjakan antara 5 (lima) orang sampai dengan 19 (sembilan belas orang) adalah usaha kecil, jika mempekerjakanantara 20 (dua puluh) orang sampai 99 orang karyawan adalah usaha menengah,

danyang mempekerjakan karyawan 100 orang atau lebih merupakan perusahaan besar.¹⁸

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa usaha kecil adalah pribadi tertentu yang secara kualitatif lebih dari kebanyakan manusia pada umumnya, yaitu pribadi yang memiliki kemampuan untuk :

- a. Berdiri di atas kekuatan sendiri
- b. Mengambil keputusan untuk diri sendiri
- c. Menetapkan tujuan atas dasar pertimbangan sendiri
- d. Berani mengambil resiko
- e. Memanfaatkan kesempatan usaha yang ada.

2. Faktor Internal dan Ekternal dalam Perkembangan Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil menengah (UKM) memang tengah menjadi primadona, Alokasi anggaran untuk usaha ini cukup besar. Banyak program yang telah dijalankan untuk memberdayakan UKM sejak hampir 20 tahun yang lalu, meskipun hasilnya sampai saat ini belum menggembirakan. Sehingga perlu dicarikan format baru yang berbeda dengan yang sebelumnya agar UKM memiliki peluang untuk berkembang, namun perkembangan Usaha Kecil Menengah di Indonesia masih terhambat oleh permasalahan yang sering dihadapi oleh UKM (Usaha Kecil Menengah) antara lain meliputi faktor internal dan ekternal.

¹⁸Ari Dewi Cahyati,et.all.,*Pemahaman Dan Kesiapan UKM Dalam Implementasi Sak Etap: Survey Pada UKM Di Bekasi*,Vol.2,No.2,Agustus 2011,h21.

Faktor internal :

- a. Kurangnya permodalan, Pemodalannya merupakan faktor utama mengembangkan suatu unit Usaha, Kurangnya permodalan UKM oleh karena pada umumnya usaha Kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya sukar diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis oleh bank tidak dipenuhi.
- b. Sumber daya Manusia (SDM) yang terbatas sebagian besar usaha kecil tumbuh secara Tradisional dan Umumnya merupakan usaha Keluarga yang turun temurun. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk mengembangkan daya saing produk yang dihasilkan.
- c. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar usaha kecil yang pada umumnya merupakan usaha turun temurun dari keluarga, mempunyai jaringan yang terbatas dan kemampuan penetrasi rendah dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.
- d. Mentalitas Pengusaha UKM ,yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM antara lain terus berinovasi, ulet tanpa

menyerah, mau berkorban serta semangat ingin mengambil resiko.¹⁹

Faktor Eksternal:

- a. Iklim Usaha yang sepenuhnya kondusif kebijaksanaan pemerintah untuk menumbuh kembangkan Usaha kecil dan menengah (UKM), Meskipun dari tahun ketahun terus disempurnakan, namun dirasakan sepenuhnya belum kondusif. Hal ini terlihat dari persaingan yang kurang sehat antara pengusaha kecil dengan pengusaha besar.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha yang diharapkan.
- c. Implikasi Otonomi daerah dengan berlakunya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah, kewenangan daerah mempunyai otonomi Untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku.²⁰

¹⁹ Dr. Thamrin Abduh, S.E.,M,Si.,*Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makasar:CV SAH MEDIA,2017),h,33

²⁰ Ibid.,h,34

Namun demikian, melihat kenyataannya bahwa jumlah UKM di Indonesia masih lebih banyak dibanding dengan jenis usaha yang lainnya. Hal ini disebabkan karena faktor penghambat perkembangan UKM tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain atau antar sektor sesama perusahaan dengan sektor yang lain, sehingga hambatan-hambatan tersebut justru dapat dijadikan sebagai motifator untuk kelangsungan UKM.

3. Strategi Pemberdayaan UKM (Usaha Kecil Menengah)

Pemerintah telah banyak melakukan kebijakan untuk pemberdayaan UKM, melalui kredit bersubsidi maupun bantuan teknis. Selain itu dunia akademis, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian, juga telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan UKM. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM maka perlu diupayakan beberapa hal untuk mengembangkan UKM diantaranya sebagai berikut:

- a. Penciptaan iklim usaha yang kondusif, pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan serta penyederhanaan prosedur perizinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.
- b. Bantuan permodalan pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu

melalui sector jasa finansial formal, sector jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura.

- c. Perlindungan usaha jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan (*win-win solution*).
- d. Pengembangan kemitraan perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun diluar negeri. Selain itu memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Sehingga UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.
- e. Pelatihan pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilannya dalam pengembangan usahanya serta menerapkan hasil pelatihan dilapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.
- f. Membentuk lembaga khusus perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuh kembangan UKM.

- g. Memantapkan asosiasi-asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.
- h. Mengembangkan promosi guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upayamempromosikan produk-produk yang dihasilkan.
- i. Mengembangkan kerjasama yang setara. Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir brbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.
- j. Mengembangkan sarana dan prasarana perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi perkembangan bagi UKM tersebut.²¹

Disamping beberapa hal diatas, ada juga beberapa jenis usaha yang bisa dilakukan oleh UKM untuk mengembangkan usahanya yaitu:

1. Usaha Manufaktur

Usaha Manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar menjadi produk yang bisa dijual kepada konsumen. Contoh dari usaha manufaktur adalah konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau

²¹ Dr. Thamrin Abduh, S.E.,M,Si.,*Strategi Internasionalisasi UMKM* (Makasar:CV SAH MEDIA,2017),h,35-36.

pengrajin bambu yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya.

2. Usaha Dagang

Usaha dagang ialah usaha yang menjual produk kepada konsumen. Contoh dan usaha dagang adalah pusat jajanan tradisional yang menjual segala macam jajanan tradisional atau toko kelontong yang menjual semua kebutuhan sehari-hari.

3. Usaha Jasa

Usaha jasa merupakan usaha yang menghasilkan jasa, bukan menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Sebagai contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet (warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen agar mereka bisa browsing, searching, blogging atau yang lainnya.²²

D. KESEJAHTERAAN KARYAWAN

1. Gambaran umum Tentang Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi, di mana kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya

²² Ferra Pujiyanti S.Pd, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat dan Terbaik Untuk Menguasai Laporan Keuangan* (Lembar Langit Indonesia, 2015), h, 70

kecemburuan sosial dalam masyarakat. Maka setiap individu membutuhkan kondisi yang sejahtera, baik sejahtera dalam hal materil dan dalam hal non materil sehingga dapat terciptanya suasana yang harmonis dalam bermasyarakat.

Definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya . Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.²³

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU tentang kesejahteraan yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaikbaiknya bagi

²³Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembngunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 24.

diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.²⁴

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan dapat diartikan persamaan hidup yang setingkat lebih dari kehidupan. Seseorang akan merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apapun dalam batas yang mungkin dicapainya, ia terlepas dari kemiskinan serta bahaya yang mengancam.

Kesejahteraan dalam pembangunan sosial ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep material dan hedonis, tetapi juga memasuki tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan bukan berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan material duniawi, melainkan juga berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual dan ukhrowi. Todaro dan Stephen C. Smith, menjelaskan bahwa upaya mencapai kesejahteraan masyarakat secara material, duniawi dan spiritual dapat dilakukan dengan memperhatikan tiga hal dasar yaitu:

a. Tingkat Kebutuhan Dasar

Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan.

b. Tingkat Kehidupan

²⁴Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1

Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik dan peningkatan pendidikan.

c. Memperluas Skala Ekonomi dari Individu dan Bangsa

Adanya pilihan pekerjaan yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan merupakan suatu tahap dalam terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang dimana orang tersebut bisa merasa cukup dan tidak mempunyai rasa kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, kesehatan, pendidikan, dalam memenuhi semua itu diharapkan UKM dapat menjadi pendongkrak dan sebagai motor untuk kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

Terpenuhinya kebutuhan primer dan sekunder dapat dilakukan melalui tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah istilah yang mengacu kepada setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang sangat baik dan sangat menguntungkan. Tindakan ekonomi terdiri dari dua aspek yaitu:

- a. Tindakan ekonomi rasional, setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan paling menguntungkan, dan kenyataan memang demikian.
- b. Tindakan ekonomi irrasional, ialah setiap usaha manusia berdasarkan dari pilihan yang menguntungkan namun kenyataan tidak demikian.

2. Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).²⁵ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik. Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁶

- a. Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting, kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara.
- b. Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil dibidang ekonomi.
- c. Penggunaan sumberdaya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak mubazir.
- d. Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil.

²⁵M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia,2003), hal 7.

²⁶Warkum Sumito, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*. Cet keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal 17.

- e. Menjamin kebebasan individu.
- f. Kesamaan hak dan peluang.
- g. Kerjasama dan keadilan.

Chapra menekankan bahwa selama negara-negara muslim terus menggunakan strategi kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk merealisasikan maqashid meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan.²⁷

3. Klasifikasi Kesejahteraan

Untuk menentukan suatu keluarga digolongkan sejahtera secara material didasarkan atas pendapatan yang dibandingkan dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan diartikan sebagai tingkat pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum. Suatu keluarga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan, tentunya tidak dapat memenuhi semua kebutuhan secara material, oleh karena itu digolongkan pada keluarga miskin. Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga

²⁷Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal 304.

Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.
3. Tahapan Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator "kebutuhan pengembangan" (*develomental needs*) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (*self esteem*) keluarga.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Indikator tahapan keluarga sejahtera.

a. Keluarga Sejahtera I (KS-I) "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*), adalah keluarga yang karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Keluarga Sejahtera II (KS-II) "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga, indikator meliputi:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
 4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah.
 5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
 6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
 7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
 8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.
- c. Keluarga Sejahtera III (KS-III) "kebutuhan pengembangan" (*developmental needs*) beberapa indikator meliputi:
1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
 2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
 3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
 4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
 5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

6. Rekreasi bersama (6 bulan sekali).
 7. Menggunakan sarana transportasi.
- d. Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus) ”aktualisasi diri” (*self esteem*) beberapa indikator meliputi:
1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
 2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.²⁸

4. Gambaran Umum Tentang Karyawan

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pengertian tenaga kerja yang digunakan di Indonesia adalah penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan-kegiatan lain, seperti: bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.²⁹Berikut ini adalah perbedaan antara pekerja/karyawan dengan swapekerja dan pegawai.³⁰

Tabel 2.1 Perbedaan Pengertian antara Pekerja/Karyawan, Swapekerja dan Pegawai

Pekerja/Karyawan	Swapekerja	Pegawai
Bekerja di bawah perintah pihak lain (pengusaha/majikan)	Tidak dibawah perintah/ pimpinan pihak lain	Bekerja di bawah perintah negara

²⁸ <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>

²⁹ Simanjuntak, Payaman J , *Manajemen Tenaga Kerja*, (Jakarta : Bina Aksara,2002), h.2

³⁰ H.Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum., Rahmawati Kusuma, S.H.,M.H, Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia, (Jakarta : Pranada Media,2019), h.15

Risiko ditanggung pengusaha/majikan	Risiko ditanggung sendiri	Risiko ditanggung pemerintah
Menerima upah/gaji	Menerima keuntungan/ laba	Menerima gaji/upah
Diatur oleh UU dan peraturan ketenagakerjaan	Tidak ada aturan khusus yang mengatur	Diatur oleh UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999.

Tenaga kerja atau karyawan adalah penjual jasa (pikiran dan tenaganya) dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu.³¹ Tenaga kerja atau karyawan adalah jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.³² Sesuai dengan pendapat yang

³¹ Hasibuan, Malayu S P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* ,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), h.1
³¹ Hasibuan, Malayu S P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* ,(Jakarta : PT Bumi Aksara,2007), h.12

³² Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung : PT Rafika Aditama,2007),h.1

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja atau karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.

E. Peran UKM Dalam Kesejahteraan Karyawan

Usaha Kecil Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat besar. Hal ini terbukti bahwa UKM mampu menyelamatkan perekonomian bangsa pada saat dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997, Menurut Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI),Suryo B.Sulisto,MBA. Kebijakan pemerintah dewasa ini telah cukup menunjukkan keberpihakan pada usaha kecil dan menengah. Banyak sudah upaya dan langkah-langkah pemerintah menyangkut pemberdayaan pada usaha kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir ini.³³

Kebijakan pemerintah untuk berpihak kepada UKM itu merupakan langkah yang sangat tepat guna membangkitkan perekonomian bangsa dan negara. Di negara-negara manapun, baik di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, UKM lah yang menjadi pilar utama perekonomian negara. Keadaan itu hanya mungkin terjadi karena pemerintahan negara-negara tersebut mempunyai kebijakan yang mendukung terciptanya kondisi usaha kecil menengah menjadi sangat sehat dan kuat. Terbukti saat krisis global

³³ Ferra Pujiyanti S.Pd, *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan & UKM: Cara Tercepat dan Terbaik Untuk Menguasai Laporan Keuangan* (Lembar Langit Indonesia, 2015), h, 71

yang terjadi beberapa tahun lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM ialah salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM. Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri. Selama ini UKM terus menunjukkan kemampuannya untuk dapat bertahan dan tetap dinamis.

Oleh karena itu pemberdayaannya harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing, serta menumbuhkan wirausahawan baru yang tangguh. Salah satu keunggulan UKM adalah, ia terkadang sangat lincah mencari peluang

untuk berinovasi untuk menerapkan teknologi baru ketimbang perusahaan perusahaan besar yang telah mapan. Tak mengherankan jika dalam era persaingan global saat ini banyak perusahaan besar yang bergantung pada pemasok-pemasok kecil menengah. Sesungguhnya ini peluang bagi kita untuk turut berkecimpung di era global sekaligus menggerakkan sektor ekonomi riil.

Secara historis UKM di Indonesia merupakan pemain utama dalam aktivitas ekonomi di dalam negeri. Karena UKM memberikan kesempatan kerja yang besar bagi penduduk Indonesia dan merupakan sumber pendapatan utama maupun sekunder bagi banyak rumah tangga di Indonesia. Kebijakan pengembangan UKM diperlukan agar menjadi sektor yang lebih mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang seimbang dan inklusif, serta menyentuh kehidupan kelompok masyarakat paling rentan dan terpinggirkan. UKM dipilih sebagai representasi ekonomi rakyat karena selain menyerap tenaga kerja sekitar 90 persen, juga karena memberi nilai tambah sekitar 56 persen dimana sektor pertanian memegang peran yang sangat besar (sekitar 70 persen).³⁴

Berdasar dari uraian di atas hendaknya UKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, mengolah potensi unggulan lokal secara optimal, mengurangi pengangguran dan meningkatkan semangat para pelaku industri kecil dan menengah yang sejenis, oleh karena itu

³⁴<https://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/10/01/kemendag-dukung-internasionalisasi-ukm-id0-1412165190.pdf>. Diakses pada hari: Jumat, 2 Agustus 2019 Pukul 20.00 wib.

perusahaan selalu berusaha mencoba membuat terobosan baru, baik dari segi produksi maupun industri. Dalam hal ini perusahaan harus senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Karena dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan UKM mempunyai peran yang sangat penting diantaranya Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya UKM lapangan kerja bertambah.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian, Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Hal ini ditujukan agar dapat memperkaya teori dalam mengkaji penelitian. Beberapa peneliti ternyata tertarik untuk mengulas hal-hal yang berketerkaitan mengenai UKM. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Sulisty³⁵ dalam penelitian yang bertujuan mendiskripsikan tatanan ekonomi khususnya UKM di Kab. Malang melalui telaah performance yang berbasis ekonomi kerakyatan, mendiskripsikan permasalahan yang dihadapi UKM, mendiskripsikan upaya-upaya pemecahan permasalahan UKM, mendiskripsikan aksesibilitas akses kegiatan UKM, mendiskripsikan peluang pengembangan kegiatan ekonomi UKM terutama di Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini

³⁵Sulisty, *Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah Dengan Basis Ekonomi Kerakyatan Di Kabupaten Malang*, (Malang : Universitas Kanjuruhan Malang), Vol 6, No 1, 2010.

menunjukkan bahwa secara umum permasalahan UKM di Kabupaten Malang terkait dengan Permodalan, Pemasaran, Manajemen dan Sumber Daya Manusia Yang Lemah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dibandingkan dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada peran UKM dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Penelitian yang dilakukan oleh Agusetyaningrum³⁶ dalam penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner serta persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, faktor penghambat yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya manusia dan lahan tempat. Sementara faktor pendukung dalam penelitian ini yaitu perijinan, pelatihan, pemasaran dan paguyuban. Kedua, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner yaitu pelatihan, perlindungan usaha, pengembangan kemitraan dan pengembangan promosi. Ketiga, persepsi

³⁶ Verniaputri Agusetyaningrum, et.all., *Strategi Pengembangan Usaha kecil dan Menengah (UKM) untuk Meningkatkan Citra Kota Malang sebagai Destinasi Wisata Kuliner (Studi pada UKM Berbasis Kuliner Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.38 No.2, 2016

wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang yaitu dipengaruhi oleh kemasan produk yang ditampilkan dan inovasi produk yang diciptakan oleh pelaku UKM kuliner di Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan UKM berbasis kuliner dan persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner di Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Santosa³⁷ dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan Menganalisis strategi pemerintah Kota Bekasi dalam pemberdayaan UKM. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinas koperasi, perindustrian, perdagangan dan pariwisata (diskoperindagpar) kota Bekasi di UMKM Di Bekasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan strategi pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan UKM.

³⁷Adil Makmur Santosa, *jurnal parameter ISSN Startegi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ukm Kota Bekasi*, Vol.2 No.1, 2017, 48.

Penelitian yang dilakukan oleh Nirwana³⁸ dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah dikabupaten enrekang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten enrekang sudah menjalankan perannya yaitu sebagai fasilitator, regulator dan katalisator. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan tipe studi kasus. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah dikabupaten enrekang.

Penelitian yang dilakukan oleh Herianto³⁹ dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya pada khususnya dan kota Salatiga pada umumnya, melalui UKM yang tumbuh dan berkembang di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Jalan Lingkar Selatan Salatiga. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa faktor yang menjadi alasan berkembangnya UKM di sekitar jalan Lingkar Selatan Salatiga karena banyak masyarakat yang melihat peluang yang ada untuk berusaha, selain itu juga karena adanya

³⁸Devi Chandra Nirwana, et.all., *Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.3 No.1, 2017

³⁹M .Roziqin Herianto, *Dampak Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga Terhadap Perkembangan Ukm Di Sekitar Jalan Lingkar Selatan Salatiga*, Among Makarti, Vol.5 No.9, 2012

pangsa pasar yang besar dengan adanya para penggiat aktivitas di Jalan Lingkar Selatan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu pada metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan pada perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan pada dampak dari pembangunan Jalan Lingkar Selatan Salatiga terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat disekitarnya pada khususnya dan kota Salatiga pada umumnya, melalui UKM yang tumbuh dan berkembang di Jalan Lingkar Selatan Salatiga serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Jalan Lingkar Selatan Salatiga.

G. Kerangka Konseptual

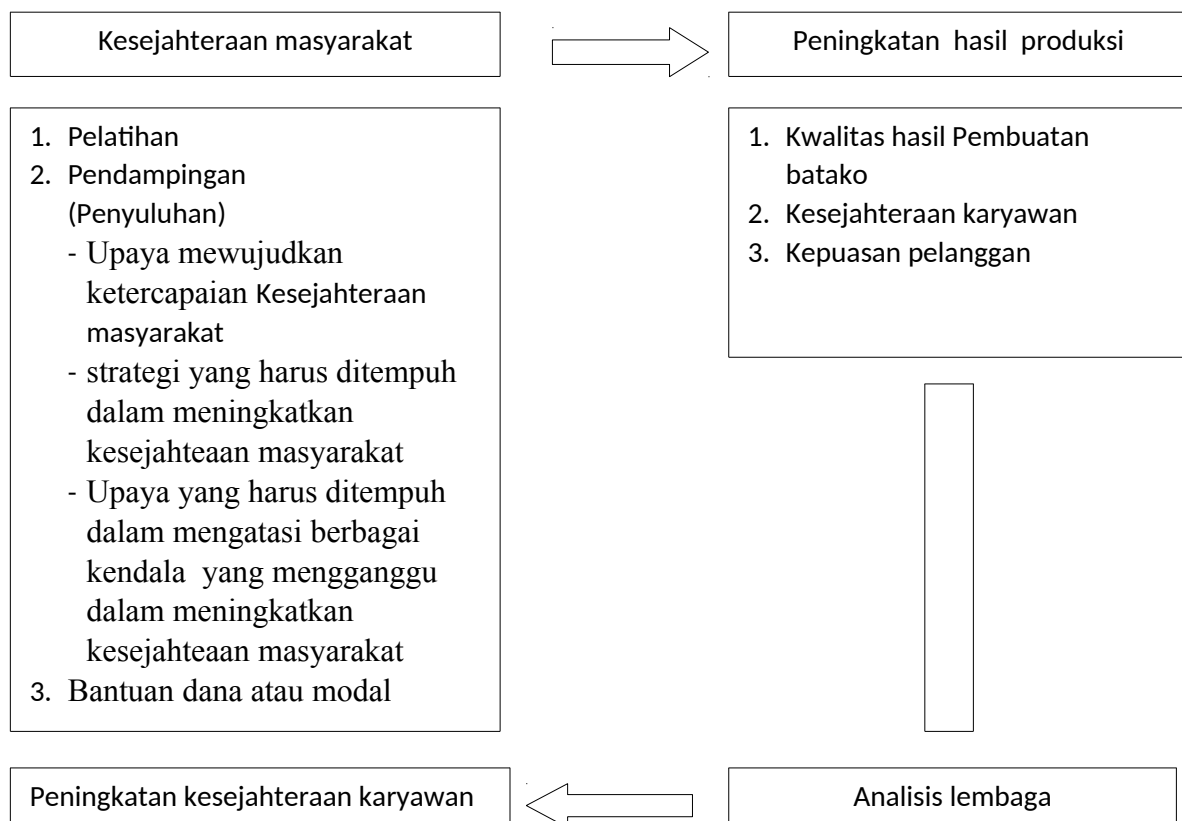
Kerangka Konseptual digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat UKM mempunyai peran yang kompeten. Namun untuk mewujudkan ketercapaian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut harus menggunakan berbagai strategi yang harus ditempuh meski melalui berbagai kendala yang harus dihadapinya. Kendala utama dalam pengembangan UKM adalah keterbatasan modal dan kurangnya SDM yang dimiliki masyarakat dalam mengelola suatu usaha. Oleh sebab itu dalam pengembangan usaha

diperlukan suatu pendampingan mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat dalam bidang usaha. Pendampingan ini dilakukan oleh Cv. Cahaya Mandiri Contruction Tulungagung.

Mengacu pada konsep dan teori diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



1. Upah karyawan sesuai standar
2. Karyawan disarankan untuk menabung
3. Kebersamaan dan kekompakan karyawan selalu dijaga

1. Analisis kekuatan
2. Analisis kelemahan
3. Analisis Peluang
4. Analisis ancaman